

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DIMODERASI OLEH INDEPENDENSI DEWAN DIREKSI

Putri Hana Khairunnisa* dan Anita*

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Internasional Batam

E-mail: 1742072.putri@uib.edu; anita.lec@uib.ac.id

ABSTRACT

The main focus of this study is to examine the interactions effect of ownership structure on corporate social responsibility disclosure and the moderating effect of board independence. The control variables used are profitability, firm size, firm age, leverage, and board size. A total of 451 companies are used and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The purposive sampling method is used in the company's annual report from 2015-2019 and is processed using Eviews. The findings obtained after testing the data show that foreign ownership has a positive and significant effect. The moderating effect of the board independence in this study affects the ownership structure (government, institutional, and foreign) on the disclosure of corporate social responsibility which is significantly positive.

Keywords: *Board Independence, Corporate Social Responsibility Disclosure, Ownership Structure, Corporate Governance, Moderating*

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir ini, pembahasan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi atensi dari para peneliti dan praktisi di berbagai belahan dunia. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa perusahaan tidak hanya harus dinilai berdasarkan pada keberhasilan ekonomi serta kinerja keuangan mereka dan diharapkan juga mereka berperilaku secara bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan (Qa'dan & Suwaidan, 2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial atau disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* membantu perusahaan dalam membentuk keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi mereka serta efisiensi penggunaan sumber daya terbatas (Mittal *et al.*, 2008).

Tanggung jawab sosial perusahaan ialah wujud komitmen dari perusahaan kepada lingkungan sosialnya terhadap aktivitas usaha yang mereka jalankan. Adapun contoh dari tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan adalah seperti menjaga lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan, menunjang prasarana

infrastruktur disekitar perusahaan mereka. Pelaksanaan tanggung jawab sosial telah dijalankan semenjak disahkannya UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang membahas tentang sanksi perusahaan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta perihal ini juga memuat perusahaan yang melakukan kegiatan sosial dan lingkungan perlu diungkapkan dalam pelaporan keuangan tahunan agar partisipasi perusahaan tersebut bisa dikenal oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Dewi & Khafi, 2018).

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat membawa harmonisasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, karena perusahaan tidak hanya diminta untuk memaksimalkan laba perusahaan tetapi juga peran pemangku kepentingan. Jamali dan Carroll (2017) mendefinisikan perusahaan

yang bertanggung jawab secara sosial akan melakukan lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan perhatiannya kepada pemangku kepentingan lainnya dalam kebijakan, pengambilan keputusan, dan operasional. Kesimpulan dari beberapa pendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan harapan masyarakat, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan yang mereka miliki. Perusahaan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dan mematuhi hukum saja, tetapi bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan amal.

Dalam hal ini, terdapat beberapa komponen yang memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yaitu pada tata kelola yang berfokus kepada struktur kepemilikan dan independensi dewan direksi. Menurut Formigoni *et al.* (2020), struktur kepemilikan dianggap sebagai faktor penting dalam mengarahkan perspektif sosial dan lingkungan dari *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan, karena jenis pemegang saham memiliki orientasi sosial dan lingkungan yang berbeda. Misalnya, kepemilikan pemerintah, institusional, dan asing.

Penelitian ini merupakan studi empiris pertama yang ada di Indonesia dengan menguji pengaruh moderasi dari independensi dewan direksi terhadap hubungan struktur kepemilikan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Studi sebelumnya baru dilakukan di Palestina menggunakan data 198 perusahaan periode 2013-2018. Belum ada penelitian dan pengembangan lain terkait peran moderasi dari independensi dewan direksi terhadap pengaruh struktur kepemilikan pada pelaporan CSR.

Apostolides (2010) memperkenalkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di lingkungan bisnis. Sejak saat itu, kesadaran diseluruh dunia tentang dampak bisnis terhadap masyarakat telah meningkat secara signifikan dan perusahaan telah mendapat dorongan atau tekanan yang lebih besar dari seluruh masyarakat, pemerintah,

dan pemangku kepentingan lainnya untuk berperilaku secara bertanggung jawab. Salah satu pendorong peningkatan tekanan bisnis adalah keserakahan perusahaan dalam mengonsumsi sumber daya untuk merealisasikan keuntungan, terlepas dari implikasi negatifnya bagi masyarakat. Implikasi negatif dari operasi perusahaan telah terlihat dalam beberapa bencana sosial dan lingkungan.

Berikut merupakan contoh kasus tanggung jawab sosial di Indonesia, yakni seperti kasus pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga atas pencemaran lingkungan. Selain itu, pencemaran juga berdampak pada udara yang menghasilkan bau busuk serta kerusakan pada jalan akibat dari truk angkut yang bermuatan melebihi kapasitas. Perusahaan yang berada di kecamatan Bandar kabupaten Simalungun ini juga mencemari aliran Sungai Tapak Kuda. Persediaan air bersih pun mulai langka akibat limbah cair dan limbah B3 sehingga kondisi pada air sudah banyak yang terkontaminasi dan tidak sehat (Martin, 2019).

Kasus lain mengenai pencemaran lingkungan juga terjadi pada PT Teguh Karsa Wana Lestari (TWKL), PT Anugerah Tani Makmur (ATM), PT Sri Indrapura Sawit Lestari (SISL), dan PTPN V. pencemaran mengakibatkan air tercemar dan ikan-ikan mati pada Sungai Leko, Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Siak, Riau. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2019. Hal lain yang menyebabkan pencemaran pada air adalah karena perusahaan membuang limbah B3 yang melebihi baku mutu dan kerusakan pada cerobong asap perusahaan sehingga emisi keluar pada tempat yang tidak semestinya. Bau dari limbah yang menggenang disungai juga mengganggu warga terutama pada waktu hujan (Suryadi, 2019).

Pada tahun 2018 PT Pertamina (Persero) mengalami kelalaian dalam aspek lingkungan hidup berkaitan dengan tumpahan minyak yang terjadi di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal disebabkan oleh pipa minyak yang bocor terkena jangkar. Dampak yang dirasakan

adalah kerusakan pada hutan mangrove seluas 34 hektar, tambak udang dan kepiting, dan pencemaran pada keramba jaring apung lobster. Makhluk hidup satwa seperti pesut dan bekantan juga mati akibat pencemaran tumpahan minyak yang diakibatkan PT Pertamina (Sohuturon, 2018). Selain itu, tragedi yang sama pada tahun 2019 disebabkan oleh PT Pertamina atas kebocoran gas dan minyak di blok Offshore North West Java (ONWJ) di pantai Cilamaya, pesisir utara Karawang, Jawa Barat. Masalah ini mengancam sumber-sumber kehidupan dan berkelanjutan alam serta kesehatan masyarakat sekitar pesisir pantai (Arumingtyas & Syahni, 2019).

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, studi ini merupakan hal yang menarik untuk dilakukan oleh penulis sebagai pembuktian pada studi empiris terdahulu dengan menggunakan data dan informasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pengembangan analisis pada studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menambahkan direktur independen sebagai dewan yang mempengaruhi hubungan pemegang saham pada pengungkapan informasi dan pelaporan CSR.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Rohmah (2016) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* atau CSR dapat disebut sebagai hubungan kerja sama untuk menguntungkan masyarakat. Dapat dikatakan pada aktivitas pengambilan keuntungan tersebut, seringkali perusahaan melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan sekitar atau melakukan dampak sosial lainnya. Konsep dari *Corporate Social Responsibility* juga bekerja sama dengan beberapa *stakeholder* untuk mengkaji dampak dari perusahaan terkait dampak apa yang akan terjadi dalam menjalankan operasional mereka terhadap lingkungan masyarakat dan sosial serta berusaha agar dampak yang

diberikan adalah hal yang positif. Dengan adanya konsep ini, maka dapat mengurangi hal – hal yang dapat merusak bumi seperti *illegal logging*, polusi, dan perubahan iklim yang ekstrem (Fahrizqi, 2010).

Tingkat dispersi kepemilikan dianggap sebagai salah satu aspek kekuatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dapat mempengaruhi tingkat pelaporan CSR (Ullmann, 1985). Pemilik profesional percaya bahwa investasi dalam kegiatan CSR akan mengarah pada peningkatan peluang untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Adnan *et al.* (2018) berpendapat bahwa terdapat kebutuhan yang besar untuk pengungkapan ketika sebagian besar saham dimiliki oleh orang asing. Dalam hal ini, perusahaan milik asing cenderung mengungkapkan informasi CSR mereka. Selain itu, tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi akan mendorong pemimpin perusahaan untuk mencapai tujuan non-finansial terkait dengan kebijakan pemerintah dan karena itu juga menciptakan tekanan pada perusahaan untuk mengejar CSR (See, 2009). Investor institusional dengan demikian memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku sosial dan lingkungan perusahaan dengan mendorong manajer untuk mengungkapkan lebih banyak CSR untuk memenuhi tujuan nirlaba mereka dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Kehadiran direktur independen di dewan pengurus dapat membantu memaksimalkan jaminan bahwa manajemen perusahaan bertindak baik untuk kepentingan pemegang sahamnya (Abuhijleh *et al.*, 2019). Dengan ini pemegang saham profesional memastikan bahwa manajer melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan mereka karena tingkat independensi dewan yang tinggi dalam peran mengontrol para manajer. Ruang rapat dewan dengan lebih banyak direktur independen akan mendorong perusahaan untuk terlibat lebih banyak aktivitas terkait CSR (Khan, 2010; Rao *et al.*, 2012). Struktur kepemilikan dapat ditentukan oleh pengungkapan CSR, jika perusahaan tidak dievaluasi hanya berdasarkan kinerja

keuangannya tetapi juga kinerja sosial dan lingkungannya.

Disebutkan bahwa CSR merupakan salah satu penghubung antara kegiatan perekonomian dengan dampak terhadap sosial dan lingkungan dikarenakan adanya *stakeholder* yang berasal dari masyarakat. Sehingga perusahaan harus lebih transparan dalam memberikan informasi terkait keuangan terhadap pemodal yang berasal dari masyarakat. Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa suatu bentuk tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap dampak operasional perusahaan yang ditimbulkan dari disisi negatif maupun positif merupakan arti dari CSR.

Kepemilikan Pemerintah dan CSR

Pemerintah adalah badan politik dan dipercaya oleh orang-orang, dan banyak melakukan kegiatan terkait sosial (Muttakin & Subramaniam, 2015; Said *et al.*, 2010). Dengan demikian, pemerintah dapat menekankan tujuan sosial dan lingkungan lebih dari nilai pemegang saham (Li & Zhang, 2010). Selain itu, pemerintah sebagai pelindung memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak lingkungan dan sosial dengan mengesahkan dan mengimplementasikan serangkaian peraturan dan kebijakan.

Apabila perusahaan dimiliki oleh pemerintah maka terdapat pelaporan positif terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial (Ghazali *et al.*, 2007). Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa dengan adanya perusahaan dari pemerintah maka dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaporan sosial dan lingkungan (Dam & Scholtens, 2012). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepemilikan pemerintah akan secara signifikan mengarah luas dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Berdasarkan teori agensi, Said *et al.*, (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan milik negara lebih rentan untuk mematuhi tekanan dari pemerintah dan oleh karena itu, mereka akan cenderung memiliki lebih banyak motivasi untuk mengurangi masalah

perantara terhadap perusahaan dan pemegang saham, masyarakat, serta pemangku kepentingan yang berbeda menyelesaikan masalah sosial masyarakat melalui pengeluaran kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial.

Hipotesis 1: Kepemilikan pemerintah memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan Institusional dan CSR

Investor institusional merupakan mayoritas pemegang saham, dan mereka memiliki pengaruh pada manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut (Naser *et al.*, 2006). Dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sangat berpengaruh dengan kepemilikan institusional. Sebagaimana dijelaskan Bushee dan Noe (2000) menyebutkan bahwa kepemilikan saham institusional terkait positif dengan peringkat pelaporan perusahaan. Investor institusi menekankan manfaat yang bagus dari berinvestasi lebih banyak di perusahaan dengan pelaporan sosial yang baik (Ullah *et al.*, 2019).

Namun, Iqbal *et al.* (2012) mengatakan bahwa investor institusi tidak mengubah keputusan investasi mereka hanya berdasarkan kegiatan laporan tahunan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengawasan manajemen dipengaruhi oleh besaran kepemilikan institusional sehingga dijelaskan oleh Listyaningsih *et al.* (2018), Nugroho dan Yulianto (2015), dan Ramdhaningsih dan Utama (2013) dengan hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dari perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional secara positif dan signifikan. Hal ini disimpulkan bahwa kepemilikan insitutorial memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan CSR (Oh *et al.*, 2011).

Hipotesis 2: Kepemilikan institusional memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kepemilikan Asing dan CSR

Keberadaan investor asing pada struktur kepemilikan perusahaan dapat membawa keragaman pengetahuan dan pengalaman karena keterlibatan pasar asing mereka. Sehingga diharapkan lebih banyak pelaporan terkait sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh pemegang saham asing (Khan *et al.*, 2013; Muttakin & Subramaniam, 2015). Investor asing lebih tertarik pada manfaat jangka panjang, yang dapat menjelaskan dukungan pemegang saham untuk kegiatan tanggung jawab sosial.

Terdapat hubungan baik antara tanggung jawab sosial dengan kepemilikan asing yang dianalisis berdasarkan dampak positif dari kepemilikan perusahaan yang mampu meningkatkan proses pemantauan perusahaan sehingga mampu ditransparansikan kepada pemangku kepentingan terkait pelaporan tanggung jawab sosial (Muttakin & Subramaniam, 2015). Penelitian terdahulu juga mendukung adanya hubungan yang positif dan signifikan pada kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR (Sartawi *et al.*, 2014). Akan tetapi, penelitian lain mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh siapa pemilik perusahaan (Anh *et al.*, 2020). Hipotesis 3: Kepemilikan asing memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Efek Moderasi dari Independensi Dewan

Dewan dengan proporsi tinggi pada non-eksekutif direktur cenderung lebih berhasil dalam mengarahkan dan mengendalikan manajemen (David, & Rodríguez-Ariza, 2019). Meskipun orang luar dan orang dalam perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya, bukti empiris yang diberikan oleh penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dewan yang didominasi orang luar lebih disukai untuk memenuhi berbagai kepentingan pemangku kepentingan (Andres *et al.*, 2005). Pengaruh investor profesional (pemerintah, institusional, dan asing) akan semakin besar ketika direksi independen mendominasi

dewan. Perusahaan tanpa direksi independen akan jauh dari tingkat tata kelola yang diinginkan dan tidak akan mendapat manfaat dari kehadiran direktur independen, yang pada gilirannya membatasi pengaruh berbagai jenis pemilik profesional terhadap pengungkapan CSR. Dibandingkan dengan direktur eksekutif, direktur independen memiliki kontrol yang kuat atas keterlibatan dewan dalam keputusan strategis, termasuk agenda pengungkapan CSR.

Hipotesis 4a: Adanya pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimoderasi oleh independensi dewan direksi.

Hipotesis 4b: Adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimoderasi oleh independensi dewan direksi.

Hipotesis 4c: Adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimoderasi oleh independensi dewan direksi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data yang diambil dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan karakteristik sampel dan tujuan dari penelitian. Laporan tahunan perusahaan tersebut bisa diunduh melalui situs *website* IDX atau www.idx.co.id. Selain itu, penulis juga menggunakan laporan keuangan dari *website* IDN sebagai referensi yaitu www.idnfinancials.com. Perusahaan yang digunakan dalam data penelitian ini sebanyak 451 perusahaan.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam tahapan pengambilan sampel ialah; 1) Perusahaan di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun berturut (2015-2019); 2) Perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan kriteria *financial firms* dan *non-financial firms* yang terdaftar di BEI; 3) Data laporan keuangan yang lengkap pada perusahaan harus lengkap pada setiap tahun; 4) Memiliki data informasi yang jelas dan

lengkap secara keseluruhan pada publikasi tahun 2015-2019 agar dapat dianalisis dengan variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, penulis bisa meneliti data yang sesuai untuk tahap pengujian data setelah proses input data dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik.

Analisis regresi panel merupakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Regresi adalah istilah statistik di mana metode ini digunakan untuk menemukan hubungan pada data yang telah diberikan. *Software* yang digunakan pada analisis penelitian ini adalah program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) dan *Eviews* 10. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini meliputi analisis statistika deskriptif, uji *outlier*, pemilihan model terbaik seperti uji chow dan uji hausman, dilanjutkan dengan uji hipotesis yaitu uji F, uji t serta pengukuran koefisien determinasi (R^2). Pada pengujian statistika deskriptif dan uji *outlier* menggunakan program SPSS. Demi menguji pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan I

$$CSRDS = \beta_0 + \beta_1GVOWN + \beta_2INOWN + \beta_3FROWN + \beta_4ROA + \beta_5FSIZE + \beta_6FAGE + \beta_7LEV + \beta_8BSIZE + \varepsilon$$

Persamaan II

$$CSRDS = \beta_0 + \beta_1GVOWN + \beta_2INOWN + \beta_3FROWN + \beta_4BIN + \beta_5GVOWN \times BIN + \beta_6INOWN \times BIN + \beta_7FROWN \times BIN + \beta_8ROA + \beta_9FSIZE + \beta_{10}FAGE + \beta_{11}LEV + \beta_{12}BSIZE + \varepsilon$$

Definisi Operasional Variabel

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk penelitian ini, pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 32 item dan dibagi

Variabel Moderator

Independensi Dewan

Independensi dewan diproksikan melalui BIN dengan rumus sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

menjadi 4 subkategori, yaitu pengungkapan lingkungan, sumber daya manusia, produk dan konsumen, dan keterlibatan masyarakat. Kategori dan item dipilih berdasarkan studi sebelumnya (Branco & Rodrigues, 2008; Branco & Rodrigues, 2006; Ernst & Ernst, 1978; Haniffa & Cooke, 2005). Pengungkapan informasi sosial merupakan data yang diungkap oleh perusahaan yaitu meliputi 9 item pengungkapan lingkungan, 9 item sumber daya manusia, 6 item produk dan konsumen, dan 8 item keterlibatan masyarakat. Pada penelitian ini, perusahaan diberi angka 1 jika item yang termasuk dalam daftar pengungkapan tanggung jawab sosial, dan 0 jika tidak mengungkapkan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan sebagai ukuran CSRDS perhitungan ini dirumuskan sebagai berikut (Adel *et al.*, 2019):

$$CSRDS = \frac{\sum \text{total poin dari (lingkungan + sumber daya manusia + produk dan konsumen + keterlibatan dalam masyarakat)}}{32}$$

Variabel Independen

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah diproksikan dengan GVOWN yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$GVOWN = \frac{\text{Persentase saham yang dipegang pemerintah}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diproksikan dengan INOWN yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$INOWN = \frac{\text{Persentase saham yang dimiliki investor institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diproksikan dengan FROWN yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$FROWN = \frac{\text{persentase saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{jumlah saham yang beredar}}$$

$$BIN = \frac{\text{direktur non-eksekutif}}{\text{jumlah banyak direktur}}$$

Variabel Kontrol

Profitabilitas (*Return on Asset*)

Profitabilitas diproksikan dengan ROA yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{total aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diproksikan dengan FSIZE yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$FSIZE = \text{Ln}(\text{Total aset})$$

Umur Perusahaan

Umur perusahaan diproksikan dengan FAGE yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$FAGE = \text{Ln}(\text{jumlah umur sejak awal perusahaan berdiri})$$

Leverage

Leverage diproksikan dengan LEV yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$LEV = \frac{\text{Total utang}}{\text{total aset}}$$

Ukuran Dewan

Ukuran dewan diproksikan dengan BSIZE yang dirumuskan sebagai berikut (Zaid *et al.*, 2020):

$$BSIZE = \text{jumlah total anggota dewan}$$

HASIL PENELITIAN

Hasil Statistika Deskriptif

Penelitian pada statistika deskriptif menggunakan data yang sudah diperoleh yaitu merupakan data sekunder. Data sekunder yang didapatkan peneliti dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI selama lima tahun terhitung dari tahun 2015 hingga 2019. Statistika deskriptif menggambarkan hasil uji berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Hasil uji yang dihasilkan berupa nilai minimum yang merupakan nilai paling kecil yang diperoleh terhadap data pada sampel perusahaan, nilai maksimum adalah nilai yang paling besar terhadap data yang diuji, dan selanjutnya *mean* merupakan nilai rata-rata yang dihasilkan dari analisis dan pengujian data sampel.

Tabel 1.

Statistika Deskriptif

Variabel	N	Min.	Maks.	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Pemerintah	2255	0,00	0,98	0,0365	0,14983
Kepemilikan Institusional	2255	0,00	1,00	0,5205	0,30977
Kepemilikan Asing	2255	0,00	1,00	0,2252	0,30115
Independensi Dewan Direksi	2255	0,00	3,00	0,2257	0,28276
<i>Return on Asset</i>	2255	-3,09	2,19	0,0179	0,17353
Ukuran Perusahaan (Jutaan Rupiah)	2255	Rp 5.073	Rp 2.458.823.912	Rp 28.507.196	Rp 135.120.042
Umur Perusahaan	2255	1	183	38,27	27,882
<i>Leverage</i>	2255	0,00	22,82	0,6006	0,96123
Ukuran Dewan	2255	2	15	4,68	2,055
Tanggung Jawab Sosial	2255	0,19	1,00	0,7757	0,09387

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Hasil Uji Hipotesis

Setelah melakukan pengujian statistika deskriptif, selanjutnya adalah membuang data *outlier* dengan tujuan mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atau menyebabkan hasil analisis data kurang tepat. Apabila uji data *outlier* tidak dilakukan, memungkinkan terjadinya penyebaran data tidak normal. Uji *outlier* yang dilakukan menggunakan pendekatan SDR (*Studentized Deleted Residual*) dengan kriteria nilai jika terjadi *outlier* maka $SDR > 1,96$ dan $SDR < -1,96$. Sebanyak 227 data *outlier* pada variabel persamaan I dan 234 data *outlier* pada variabel persamaan II.

Terdapat metode-metode yang digunakan dalam uji regresi antaranya adalah FEM (*fixed effect model*), dan REM (*random effect model*), dan PLS (*pooled least square*). Untuk menentukan model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji chow dan uji hausman. Uji chow menunjukkan angka 0,0000 pada persamaan I dan II yang artinya probabilitas kurang dari 0,05 dan model yang digunakan adalah *fixed effect model* dalam pengujian selanjutnya. Berdasarkan hasil uji hausman pada persamaan I dan II, angka yang ditunjukkan sebesar 0,0000 yang artinya probabilitas kurang dari 0,05 dan model yang tepat digunakan pada pengujian selanjutnya adalah *fixed effect model*.

Uji F berperan dalam menentukan kriteria pengujian tersebut memenuhi kriteria

atau tidak. Jika diketahui bahwa nilai probabilitas adalah lebih kecil dari 0,05 maka variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Hasil pengujian membuktikan nilai probabilitas kurang dari 0,05 atau sebesar 0,000000 pada persamaan I dan II yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan hubungan variabel independen dan dependen dipengaruhi oleh variabel moderator. Hasil uji koefisien determinasi pada persamaan I menunjukkan angka sebesar 0,719085 atau 71,91% dan pada persamaan II hasil pengujian menunjukkan angka 0,720598 atau 72,06%.

Berdasarkan tabel dan perhitungan di bawah diketahui bahwa variabel independen struktur kepemilikan yaitu kepemilikan asing berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh yang baik terhadap variabel terikat. Pada variabel-variabel kontrol antara lain ROA *leverage*, dan board size dibuktikan adanya efek negatif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan pada umur perusahaan dibuktikan dengan pengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan hasil dari probabilitas kurang dari 0,05 dan menerima hipotesis. Ukuran perusahaan terbukti adanya efek negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Tabel 2.

Hasil Uji t Persamaan I

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,719683	0,080452	8,945491	0,0000
GVOWN	-0,011786	0,030535	-0,385972	0,6996
INOWN	-0,008423	0,005042	-1,670743	0,0950
FROWN	0,008487	0,008151	-1,041367	0,0297
ROA	-0,004151	0,007426	-0,559009	0,0257
FSIZE	-0,002753	0,005460	-0,504220	0,6142
FAGE	0,076352	0,028895	2,642436	0,0083
LEV	-0,002555	0,002238	-1,141702	0,0253
BSIZE	-0,002507	0,000993	-2,524778	0,0117

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Tabel 3.
Hasil Uji t Persamaan II

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,715142	0,080253	8,911056	0,0000
GVOWN	-0,020796	0,035699	-0,582554	0,5603
INOWN	-0,002560	0,005618	-0,455659	0,6487
FROWN	-0,001439	0,009442	-0,152448	0,8789
BIN	-0,002057	0,008971	-0,234008	0,8587
GVOWNxBIN	0,041348	0,083086	0,497654	0,0117
INOWNxBIN	0,029284	0,011788	-2,484335	0,0131
FROWNxBIN	0,023492	0,019988	1,175330	0,0400
ROA	-0,005007	0,007367	-0,679695	0,0468
FSIZE	-0,002636	0,005436	-0,484938	0,6278
FAGE	0,077283	0,028881	2,675871	0,0075
LEV	-0,002531	0,002231	-1,134347	0,0268
BSIZE	-0,002267	0,001004	-2,257657	0,0241

Sumber: Data sekunder diolah, 2020.

Pada hasil pengujian di atas, membuktikan nilai probabilitas variabel pada interaksi antara kepemilikan institusional dengan independensi dewan direksi, interaksi antara kepemilikan pemerintah dengan independensi dewan direksi, dan interaksi antara kepemilikan asing dengan independensi dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara matematis, persamaan regresi penelitian dimodelkan sebagai berikut.

Persamaan I

$$CSRDS = 0,719683 - 0,011786GVOWN - 0,008423INOWN + 0,008487FROWN - 0,004151ROA - 0,002753FSIZE + 0,076352FAGE - 0,002555LEV - 0,002507BSIZE + \epsilon$$

Persamaan II

$$CSRDS = 0,715142 - 0,020796GVOWN - 0,002560INOWN - 0,001439FROWN - 0,002057BIN + 0,041348GVOWNxBIN + 0,029284INOWNxBIN + 0,023492FROWNxBIN - 0,005007ROA - 0,002636FSIZE + 0,077283FAGE - 0,002531LEV - 0,002267BSIZE + \epsilon$$

Pembahasan

Hipotesis pertama, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini tentunya bertentangan dengan Zaid *et al.* (2020) dan Habbash (2016) bahwa

pemerintah merupakan badan politik yang dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka lebih banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Pemegang saham publik tidak mendukung dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan data pada Bursa Efek Indonesia (BEI), BUMN yang terdaftar hanya sebanyak 25 perusahaan. Hal ini menjadi bukti bahwa perusahaan dengan jumlah pemegang saham publik lebih sedikit dan tidak melakukan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR sehingga hipotesis pertama tidak dapat diterima.

Hipotesis kedua, struktur kepemilikan pada kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dan kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif. Investor institusional tidak memilih berinvestasi pada pengungkapan perusahaan atas aktivitas sosial dan lingkungan dalam informasi laporan tahunan. Berdasarkan penelitian Zaid *et al.* (2020) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan sehingga variabel tersebut ditolak. Alasan lain menyebutkan bahwa pemegang saham institusional tidak memberikan tekanan lebih kepada manajemen atas untuk menyebarkan lebih banyak informasi terkait kegiatan CSR, sehingga alasan tersebut membuktikan bahwa kepemilikan institusional di Indonesia kurang efektif dalam mempengaruhi dan

memantau keputusan manajemen terkait dengan pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun kehadiran investor institusional mendominasi kepemilikan saham di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis ketiga, kepemilikan asing pada hasil pengujian dibuktikan dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 yang berarti pengujian mengalami pengaruh signifikan dan kedua variabel memiliki hubungan yang positif. Apabila tingkat kepemilikan asing lebih tinggi maka akan menghasilkan pengungkapan CSR yang lebih luas. Perusahaan asing yang sedang berada di negara tuan rumah dan hal ini mendorong mereka dalam melakukan kegiatan sosial dan melakukan pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR ini juga merupakan strategi yang dilakukan untuk mencapai arus masuk modal yang berkelanjutan dan menarik perhatian calon investor baru di tingkat negara tuan rumah (Alshbili *et al.*, 2019). Hal ini dilakukan untuk membangun kembali atau memperkuat daya saing mereka dan menjadikan diri mereka menonjol dengan harapan dapat memprioritaskan mereka di masa depan pada sektor masing-masing perusahaan.

Hipotesis keempat, hasil pengujian membuktikan variabel moderator dapat mempererat hubungan antara struktur kepemilikan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara signifikan dan positif. Bukti analisis didukung pada kehadiran anggota dewan direksi independen di Indonesia, mereka dapat memonitor pemegang saham publik dalam mengungkapkan lebih banyak informasi terkait CSR sebagai sarana membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hasil analisis ini juga dikaitkan dengan peran dan pengaruh dari direktur independen pada fungsi pemantauan investor institusional. Artinya, direktur independen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberdayakan pemegang saham seperti investor institusional dalam mengejar tindakan manajer secara terstruktur. Untuk menjaga

reputasi bisnis, mereka mendorong manajemen untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR. Hasil analisis menunjukkan ketika proporsi direktur independen meningkat, maka pengaruh struktur kepemilikan asing pada pengungkapan CSR akan signifikan. Di Indonesia, pengaruh perusahaan dengan pemegang saham investor asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan CSR. Kehadiran anggota direktur independen juga dapat mendorong investor asing dalam menunjukkan minat mereka dalam masalah sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia. Penelitian ini didukung dengan studi empiris yang dilakukan oleh Zaid *et al.* (2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dimoderasi independensi dewan direksi. Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Akibat dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Zaid *et al.* (2020). Perusahaan dengan proporsi dewan independensi yang lebih tinggi, dianggap dapat bekerja di bawah praktik tata kelola yang baik. Tingkat independensi dewan memiliki dampak penting dalam pengambilan keputusan dengan kata lain pengaruh pemegang saham profesional (pemerintah, institusional, dan asing) pada keputusan perusahaan dipengaruhi orientasi direktur independen.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Qa'dan, M. B., & Suwaidan, M. S. (2019). Board composition, ownership structure and corporate social responsibility disclosure: the case of Jordan. *Social Responsibility Journal*, 15(1), 28–46. <https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2017-0225>

- Adel, C., Hussain, M. M., Mohamed, E. K. A., & Basuony, M. A. K. (2019). Is corporate governance relevant to the quality of corporate social responsibility disclosure in large European companies? *International Journal of Accounting and Information Management*, 27(2), 301–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-10-2017-0118>
- Adnan, S. M., Hay, D., & van Staden, C. J. (2018). The influence of culture and corporate governance on corporate social responsibility disclosure: a cross country analysis. *Accounting Research Journal*, 198, 820–832. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.057>
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E. (2019). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Empirical evidence from a developing country. *Accounting Research Journal*, 33(1), 148–166. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2018-0060>
- Anh, N. T., & Tran, H. L. (2020). The determinants of corporate social responsibility disclosure: evidence from Vietnam's listed companies in chemical industry. *Journal of International Economics and Management*, 20(1), 18–41. <https://doi.org/10.38203/jiem.020.1.0002>
- Apostolides, N. (2010). Exercising corporate governance at the annual general meeting. *Corporate Governance*, 10(2), 140–149. <https://doi.org/10.1108/14720701011035666>
- Dam, L., & Scholtens, B. (2012). Does ownership type matter for corporate social responsibility? *Corporate Governance: An International Review*, 20(3), 233–252. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2011.00907.x>
- Fallah, M. A., & Mojarrad, F. (2019). Corporate governance effects on corporate social responsibility disclosure: empirical evidence from heavy-pollution industries in Iran. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 208–225. <https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2017-0072>
- Formigoni, H., Segura, L., Gallego-Álvarez, I., & Garcia-Sanchez, I. M. (2020). Board of directors characteristics and disclosure practices of corporate social responsibility: a comparative study between Brazilian and Spanish companies. *Social Responsibility Journal*, January 2019. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0043>
- Habbash, M. (2016). *Social Responsibility Journal Social Responsibility Journal*. 1(1), 53–62.
- Iqbal, N., Ahmad, N., Basheer, N. A., & Nadeem, M. (2012). Impact of corporate social responsibility on financial performance of corporations: evidence from Pakistan. *Accounting Research Journal*, 2(6), 107. <https://doi.org/10.5296/ijld.v2i6.2717>
- Jamali, D., & Carroll, A. (2017). Capturing advances in CSR: developed versus developing country perspectives. *Business Ethics*, 26(4), 321–325. <https://doi.org/10.1111/beer.12157>
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate governance and corporate social responsibility disclosures: evidence from an emerging economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N. (2018). The effect of good corporate governance on corporate social responsibility disclosure on Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(3), 273–281. <https://doi.org/10.17358/ijbe.4.3.273>
- Md Shahid Ullah, Mohammad Badrul Muttakin, A. K. (2019). *Corporate governance and corporate social responsibility disclosures in insurance companies. Unit 07*, 1–5.

- Muttakin, M. B., & Subramaniam, N. (2015). Firm ownership and board characteristics: do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian Companies? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138–165. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-10-2013-0042>
- Nugroho, M. N., & Yulianto, A. (2015). Pengaruh profitabilitas dan mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan CSR perusahaan terdaftar JII 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i1.7829>
- Oh, W. Y., Chang, Y. K., & Martynov, A. (2011). The effect of ownership structure on corporate social responsibility: empirical evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(2), 283–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z>
- Ramdhaningsih, A., & Utama, I. M. K. (2013). Pengaruh indikator good corporate governance dan profitabilitas pada pengungkapan corporate social responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 3(3), 65–82.
- Rohmah, D. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility di dalam laporan sustainability (studi empiris pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013). *Esensi*, 5(2), 243–262. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2347>
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2010). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212–226. <https://doi.org/10.1108/17471110910964496>
- Sartawi, I. I. S. M., Hindawi, R. M., Bsoul, R., & Ali, A. J. (2014). Board composition, firm characteristics, and voluntary disclosure: the case of Jordanian firms listed on the Amman Stock Exchange. *International Business Research*, 7(6). <https://doi.org/10.5539/ibr.v7n6p67>
- Tangdialla, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 7(2), 203–214.
- Zaid, M. A. A., Abuhijleh, S. T. F., & Pucheta-Martínez, M. C. (2020). Ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: The moderating effect of board independence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, September 2019, 1–17. <https://doi.org/10.1002/csr.1888>